**ABSTRAK**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan kabupaten/kota. Pengawasan DPRD dalam terselenggaranya program BPJS Kesehatan terhadap masyarakat belum berjalan maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan. Masalah yang dialami oleh DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap program BPJS Kesehatan seperti kurangnya kompetensi yang dimiliki DPRD dan latar belakang pendidikan serta keterlambatan penyelesaian masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kinerja DPRD yang ada perlu ditingkatkan sehingga menunjang pengawasan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dari program BPJS Kesehatan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja DPRD dalam pengawasan program BPJS Kesehatan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Kemudian data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis dalam kegiatan magang menyimpulkan bahwa kinerja DPRD dalam pengawasan program BPJS Kesehatan di Kota Kendari masih belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat banyak hambatan yang dialami dalam melakukan pengawasan terhadap program BPJS Kesehatan. Kinerja DPRD yang ada juga masih terhambat dikarenakan pendidikan dan keterlambatan penyelesaian masalah yang masih belum maksimal. Walaupun begitu DPRD Kota Kendari melakukan upaya dalam mengatasi hambatan seperti melakukan upaya mengikutkan aparatur untuk diklat/Bimtek dalam meningkatkan kemampuan anggota. Mempedomani jadwal agenda persidangan. Adapun saran yang diberikan yaitu adanya upaya semaksimal mungkin untuk membuka ruang kepada masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana mereka akan berpartisipasi dalam pembangunan

Kata Kunci : DPRD, Pengawasan.

*ABSTRACK*

*Kendari Municipal People's Representative Council is a regional representative body domiciled as a district / municipal government institution. Parliamentary oversight in the implementation of BPJS Health programs to the public has not run maximally due to several obstacles. Problems experienced by the DPRD in implementing supervision of BPJS Health programs such as lack of competence possessed by DPRD and educational background as well as delays in problem solving complained by the community. Existing DPRD performance needs to be improved so as to support the supervision done to solve the problems of the BPJS Health program. The purpose of this study is to determine the performance of parliament in the supervision of BPJS Health program in Kendari City, Southeast Sulawesi Province.*

*The research method that I use is qualitative descriptive method with inductive approach. Then the data collected by using interview techniques, observation and documentation so that the data obtained can be accounted for.*

*Based on the analysis in the apprenticeship activity concluded that the performance of DPRD in supervising BPJS Health program in Kendari City still not running maximally, there are still many obstacles experienced in doing supervision to BPJS Health program. The performance of the existing DPRD is also hampered due to the education and delay of problem resolution which is still not maximal. Nevertheless Kendari City Parliament made efforts in overcoming obstacles such as making efforts to include apparatus for training / bimtek in improving the ability of members. Guarding the agenda schedule of the trial. The advice given is the existence of efforts as much as possible to open space to the community, providing an opportunity for the community to choose how they will participate in the development*

*Keywords: DPRD, Supervision.*